

## **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA DAERAH UNTUK MAHASISWA KABUPATEN LAMANDAU**

**Yullya Putri Utami**  
*utamiyulia31@gmail.com*

### **ABSTRACT**

The implementation of public policy is one of the activities in a public policy process that determines whether a policy is in contact with the public interest and can be accepted by the public. Implementation of the Regional Scholarship Program for Lamandau Regency Students based on the Regulations of the Regent of Lamandau Number. 24 of 2013. The scholarship program in the Lamandau Regency area has been in place since 2009 and this program was carried out by the Education and Culture Office of Lamndau Regency. This program aims to help students from Lamandau Regency to accelerate the lecture process and to improve human resources.

This study uses a qualitative approach, data collection obtained from interviews, observation, and documentation. And using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and conclusion drawing.

In this study the author uses the Geogre C. Edward III policy implementation model with 4 (four) variables, namely communication, resources, position and bureaucratic structure. Based on the results of the research based on communication variables, it is still not optimal. The lack of socialization from the Dinas to students who will receive scholarship assistance, for resources such as the number of staff, facilities and infrastructure is sufficient. As for the inhibiting factors for this program, the delay in channeling funds from the company as donors and students is still lacking pay attention to systematics, and the requirements set by the Education and Culture Office of Lamandau Regency.

***Keywords: Program Implementation, Regional Scholarship***

## PENDAHULUAN

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi prestasi kepada mahasiswa, yang berupa uang dan diberikan kepada perorang mahasiswa. Ataupun berupa bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan finansial. Dengan tujuan membantu mahasiswa agar bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang mempunyai masalah dalam pembiayaan, menciptakan pemerataan suatu ilmu pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan dan terciptanya sumber daya manusia baru yang cerdas. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk bukti nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik dalam provinsi, kota maupun di Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Lamandau merupakan salah satu kabupaten yang melakukan gebrakan dalam rangka mendukung sumber daya manusia (SDM) secara terus menerus, antaranya dalam bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa asal Lamandau yang menempuh ilmu pendidikan di luar daerah setempat. Sebab, kemajuan daerah juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang handal. Untuk memperolehnya maka para generasi muda daerah harus dibekali dengan ilmu pendidikan yang tinggi. Sehingga setelah lulus mereka (mahasiswa) bisa kembali ke Kabupaten Lamandau bersama-sama membangun daerah dengan bidang ilmu yang dikuasainya.

Beasiswa tersebut diberikan kepada perorangan mahasiswa yang digunakan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh mahasiswa tersebut. Pemberian beasiswa tersebut diberikan kepada mahasiswa dalam jangka waktu satu tahun sekali, minimal beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang duduk pada semester dua dan batas pemberian beasiswa tersebut sampai semester sepuluh. Adapun jenis-jenis beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan adalah:

1. Beasiswa kurang mampu, adalah bantuan biaya peserta didik pada jenjang SD/MI, SLTP/SATAP, dan SLTA.
2. Beasiswa kerjasama pendidikan, adalah beasiswa yang diberikan berdasarkan peraturan yang tertera dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah daerah dan institusi terkait.
3. Beasiswa kedokteran, adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Lamandau yang mengambil jurusan kedokteran.
4. Beasiswa kerjasama penerimaan, adalah beasiswa yang diberikan kepada putra-putri asal Kabupaten Lamandau yang mengikuti tes penerimaan mahasiswa yang dikelola bersama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.
5. Beasiswa umum, adalah beasiswa mahasiswa yang diberikan kepada putra-putri asal Kabupaten Lamandau yang tidak termasuk kriteria pada nomor (1), nomor (2), nomor (3), dan nomor (4).
6. Beasiswa dari dana *Community Development*, adalah beasiswa yang diberikan kepada putra-putri asal Kabupaten Lamandau yang diberikan oleh perusahaan di wilayah Kabupaten Lamandau.

Kegiatan pemberian beasiswa daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan permohonan yang bersangkutan (Mahasiswa). Mekanisme pemberian beasiswa disalurkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dana tersebut diberikan langsung oleh perusahaan sebagai pihak yang ikut membantu pemberian dana beasiswa. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa adalah:

1. Penerima beasiswa daerah adalah putra-putri dari Kabupaten Lamandau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
2. Aktif mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan surat aktif mengikuti pendidikan dari Dekan.
3. Mempunyai indeks prestasi kumulatif  $\geq 2$ .
4. Memiliki kartu pelajar atau kartu mahasiswa.

Jumlah beasiswa yang diberikan kepada setiap mahasiswa setiap satu tahun sekali sebesar Rp. 4.200.000; Jumlah ini disamaratakan baik beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi maupun untuk mahasiswa yang kurang mampu. Program pemberian beasiswa ini sudah ada sejak tahun 2009 atas inisiatif dari Ir. Marukan sebagai bupati Lamandau.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimana pun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya bagaimana pun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politisi dengan adanya intervensi sebagai kepentingan.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2012:139), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2000:104) di mana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian

tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Merrile Grindle (1980) mengatakan bahwa:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” (Leo Agustino, 2012:138-140).

### **Model-model Implementasi Kebijakan**

Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2012:149) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan Implementasi kebijakan, yaitu diantaranya meliputi variabel atau faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

#### ***Faktor Komunikasi***

Komunikasi diartikan sebagai proses penyimpanan informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*Policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsisten (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantar mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Dimensi konsisten (*consistency*), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan) karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijelaskan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

### **Sumber Daya**

George C. Edward III dalam Widodo menegaskan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Jadi efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*). Oleh karena itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implementors*) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja yang berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (*esensi*) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (*rules and regulations*) berlaku.

### **Sumber Daya Anggaran**

Sumber daya berikutnya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.

Terbatasnya intensif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup.

### ***Sumber Daya Peralatan***

Menurut George C. Edward III dalam Widodo (2011:99) sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

### ***Sumber Daya Informasi dan Kewenangan***

Sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

Kewenangan (*authorty*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Manakala lembaga tersebut tidak diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, bukan saja wibawa lembaga akan merosot dimata masyarakat yang dilayani, tetapi jauh lebih dari itu masalah yang dikemukakan tidak akan segera dipecahkan, bahkan cenderung terus mengalami tumbuh kembang dihadapannya.

#### **1. Disposisi**

Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2012:152) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

#### **2. Struktur Birokrasi**

Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2012:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan

yang tersedia, atau para kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan cara melakukan koordinasi dengan baik.

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

George C. Edward III dalam Leo Agustino, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/kearah yang lebih baik adalah: melakukan *standart operating procedure* (SOP) dalam melaksanakan fragmentasi. Setiap melaksanakan kebijakan harus ditetapkan *standart operating procedure* (SOP) sebagai pedoman, tuntutan, petunjuk, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakan kebijakan. Sedangkan pelaksanaan pragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

### 3. Program Bantuan Beasiswa

Beasiswa kurang mampu adalah salah satu bantuan biaya yang diberikan pemerintah kabupaten Lamandau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada mahasiswa asal Kabupaten Lamandau dari keluarga yang kurang mampu. Kegiatan pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau kepada mahasiswa yang kurang mampu berdasarkan pengajuan permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan dengan syarat tambahan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah tempat dimana mahasiswa yang bersangkutan berdomisili dan sedang aktif menempuh pendidikan diperguruan tinggi. Mekanisme pemberian beasiswa kurang mampu ditransfer langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan. Tahapan penyaluran beasiswa kurang mampu biasanya disalurkan seminggu setelah penyaluran beasiswa berprestasi disalurkan.

Beasiswa berprestasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi dalam bidang akademik dan sedang aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang berasal dari Kabupaten Lamandau. Syarat penerima beasiswa berprestasi harus memperoleh indeks prestasi 3,00. Kegiatan pemberian beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dan mekanisme penyalurannya ditransfer langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan dengan waktu yang tidak ditentukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan variabel yang sangat penting dalam implementasi pemberian beasiswa daerah Kabupaten Lamandau. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam penerimaan kebijakan oleh kelompok, sasaran/masyarakat sehingga kualitas suatu komunikasi akan sangat mempengaruhi dalam pencapaian efektivitas suatu implementasi kebijakan publik/suatu program yang akan dilaksanakan. Tidak hanya komunikasi antara para pelaksana program yang perlu diperhatikan, akan tetapi komunikasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat (mahasiswa) juga sangat berperan penting dalam keberhasilan suatu implementasi program pemberian beasiswa ini. Dalam pengimplementasian pemberian bantuan beasiswa daerah Kabupaten Lamandau yang dimuat dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau hanya paham apa yang menjadi isi, tujuan, dan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran. Akan tetapi bagaimana mungkin suatu program berjalan dengan baik apabila komunikasi antar para pelaksana program (Dinas) dengan masyarakat (mahasiswa) tidak terjalin dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana program untuk lebih memperbaiki penyaluran informasi kepada mahasiswa agar implementasi program pemberian beasiswa daerah Kabupaten Lamandau ini berjalan dengan efektif dan tentunya mahasiswa juga dapat ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut. Sebagai implementator dalam pelaksanaan program pemberian beasiswa daerah Kabupaten Lamandau Dinas pendidikan dan Kebudayaan harus mengutamakan penyaluran komunikasi yang baik terhadap Himpunan Mahasiswa Lamandau dan mahasiswa sebagai penerima kebijakan, seperti lebih banyak mengadakan sosialisasi agar mahasiswa lebih jelas mengetahui maksud, tujuan, dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dari program pemberian beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau. Namun faktanya sampai saat ini komunikasi antara pelaksana program dengan masyarakat (mahasiswa) masih belum optimal, hal ini dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa, kurangnya melakukan sosialisasi tentang program pemberian beasiswa daerah terhadap mahasiswa, sehingga dapat mempersulit mahasiswa untuk mengetahui informasi, perubahan yang dibuat secara spontan dan mempersulit mahasiswa dalam mendapatkan informasi mengenai tata cara untuk mendapatkan dana bantuan beasiswa. Dengan adanya sosialisasi program akan membantu untuk menciptakan program pemberian Beasiswa Daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau yang efektif dan optimal.

### **Sumber Daya**

Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan suatu program, tentunya tidak lepas dari sumber daya para implementator kebijakan program tersebut. Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara baik apabila para implementatornya kekurangan sumber

daya untuk melaksanakan maka program tidak akan berjalan dengan baik. Dalam variabel sumber daya terdapat 4 indikator yang mempengaruhi dalam melaksanakan kebijakan yaitu staf, wewenang, informasi dan fasilitas. Dalam melaksanakan program pemberian beasiswa daerah Kabupaten Lamandau membutuhkan staf yang memiliki sumber daya yang memadai agar dapat melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya dengan baik. Kewenangan juga harus jelas antara staf pelaksana program agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan suatu program. Informasi yang jelas antara para pelaksana program, agar informasi tersebut bisa cepat tersampaikan kepada sasaran penerima kebijakan. Fasilitas yang memadai akan mempermudah para pelaksana kebijakan untuk menjalankan program pemberian beasiswa daerah Kabupaten Lamandau.

- a. Staf, staf yang bekerja sebagai pelaksana program pemberian beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau sudah memadai. Dengan jumlah staf yang sudah sesuai akan mendukung pelaksanaan program.
- b. Wewenang, untuk pemberian wewenang kepada Himpunan Mahasiswa Kabupaten Lamandau (HIMA) sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kepada HIMA untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa dan HIMA juga turut membantu dalam penerimaan pengumpulan berkas pengajuan untuk mendapatkan beasiswa.
- c. Informasi, untuk informasi masih mengalami kendala terutama dalam sosialisasi kepada mahasiswa masih tergolong kurang terutama sosialisasi terkait Perbub dan program beasiswa itu sendiri. Sehingga mahasiswa sulit mendapatkan informasi tentang ada dibentuknya perubahan-perubahan yang spontan.

### **Disposisi**

Disposisi/sikap seperti komitmen, kejujuran, sikap demokratis dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program, juga sangat berpengaruh untuk berhasil atau tidaknya suatu program. Dalam sebuah disposisi/pengambilan sikap terdapat dua indikator yaitu pengangkatan birokrat dengan pemberian insentif. Seperti yang diketahui pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi yang khusus. Dengan pemberian insentif tambahan merupakan faktor pendukung yang sangat baik dalam melaksanakan program tersebut dan sesuai target yang sudah ditentukan.

Sebagai pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau sudah dijalankan dengan baik untuk pengangkatan birokratnya dengan membentuk tim-tim yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Untuk pemberian insentif tambahan itu ada, petugas pelaksana program diberikan insentif sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tentunya dengan adanya pemberian insentif tambahan akan memacu semangat dan ketekunan lagi bagi para pelaksana program pemberian beasiswa daerah Kabupaten Lamandau dengan demikian maka program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau akan berjalan dengan optimal.

### **Struktur Birokrasi**

Di dalam sebuah implementasi kebijakan tentunya harus ada struktur birokrasi. Struktur organisasi disebut juga dengan struktur pemerintah yang menjalankan sebuah proses pengimplementasian sebuah kebijakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah proses pelaksanaan program. Struktur birokrasi adalah salah satu aktor pemerintah dalam mendukung kelancaran dan memaksimalkan sebuah pencapaian dalam tujuan kebijakan yang dibuat.

Dalam struktur birokrasi yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yaitu Standart Operating Procedur (SOP). SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan menurut apa yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan program Pemberian Beasiswa Daerah untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau sudah mengerjakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan-arahan sudah diberikan atasan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan SOP yang sudah ditentukan untuk melaksanakan program Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Daerah Kabupaten Lamandau.

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah suatu kendala pada saat proses pelaksanaan suatu kebijakan, jika faktor penghambat atau masalah tersebut tidak diselesaikan atau dievaluasi maka keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan sulit tercapai. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan implementasi program pemberian beasiswa daerah untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau, antara lain:

1. Keterlambatan penyaluran dana dari perusahaan-perusahaan sebagai donator kepada Dinas, sehingga pihak Dinas terlambat melakukan penyaluran kepada mahasiswa. Keterlambatan saluran bantuan tersebut dapat menyebabkan sebuah kebijakan tidak berjalan dengan optimal, pengimplementasian Peraturan bupati ini juga terhambat.
2. Kurangnya sosialisasi kepada mahasiswa, tentang Peraturan Bupati dan adanya perubahan atau pembuatan kebijakan secara spontan. Sosialisasi yang tidak sebagaimana mestinya merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan sebuah program. Selain mensosialisasikan tentang program tersebut para pelaksana juga harus mensosialisasikan tentang Peraturan Bupati. Kurangnya sosialisasi ini menjadi salah satu penyebab mahasiswa tidak mengetahui secara rinci Peraturan Bupati tersebut.
3. Mahasiswa, Mahasiswa calon penerima bantuan beasiswa itu sendiri masih kurang memahami bagaimana sistematis, dan terkadang persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas terkait tidak dipenuhi, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses penyaluran.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan implementasi program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari sisi komunikasi, masih belum berjalan dengan lancar dan baik. Dari sisi komunikasi implementasi memang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kepada Himpunan Mahasiswa Kabupaten Lamandau dan kepada mahasiswa calon penerima bantuan beasiswa. Namun untuk sosialisasi masih kurang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga mahasiswa masih kurang mengetahui informasi-informasi terkait program beasiswa, kemudian mahasiswa juga masih kurang mengetahui peraturan bupati yang mendasari program pemberian beasiswa itu sendiri.
2. Dari sisi sumber daya, untuk jumlah staf sebagai pelaksana program pemberian beasiswa daerah sudah memadai, fasilitas sarana dan prasaran seperti computer, admin dan lain-lain sudah memadai.
3. Dari sisi disposisi, sikap para pelaksana kebijakan (birokrat) sangat mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. sehingga dengan adanya pembentukan tim-tim yang bertugas untuk melaksanakan program pemberian beasiswa daerah kepada mahasiswa Kabupaten Lamandau ini sudah dibentuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dari sisi struktur birokrasi, selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau sebagai pelaksana Program Pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau sudah melakukan pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP yang ada dan melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan.
5. Faktor penghambat : Keterlambatan penyaluran dana dari pihak donatur yaitu perusahaan-perusahaan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, sehingga faktor tersebut juga ikut menghambat proses penyaluran yang dilakukan Oleh Dinas Pendidikan dan
6. Kebudayaan kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan menerima dana bantuan beasiswa tersebut. Mahasiswa yang masih kurang memperhatikan bagaimana sistematis, persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan dana bantuan beasiswa tersebut, sehingga hal tersebut dapat menghambat jalannya program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Marilee S, 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*, Princeton University Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Lester, James P, Stewart, Joseph, 2000. *Publik Policy An Evaluationary Approach*, Wadsworth, Stamford, USA.
- Parons, Mayne. 2001. *Public Policy: Pengantar Teory Dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta Kencana.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

### Jurnal:

- Jann & Wegrich. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, Dan Metode*, Bab 7.

### Dokumen:

- Peraturan Bupati Lamandau No.24 tahun 2013 tentang pedoman pemberian beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau.

### Internet:

- <https://www.borneonews.co.id/berita/80659-pemkap-lamandau-mulai-salurkan-bantuan-beasiswa-untuk-mahasiswa>(di akses 24 Mei 2018).
- <http://m.kalteng.prokal.co/read/news/47082-pemkab-siapkan-rp2-miliar.html>  
(di akses 24 mei 2018).
- <https://www.studineews.co.id>(di akses 29 Oktober 2018).